

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi saat ini mendorong terjadinya efisiensi di semua sektor masyarakat. Dampak perkembangan teknologi tidak hanya dirasakan dalam dunia bisnis tetapi juga dalam pemerintahan. Penggunaan teknologi saat ini sangat penting karena dapat membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien (Basir, 2018). Khususnya di bidang pemerintahan, perkembangan teknologi diharapkan dapat membuat sistem pemerintahan menjadi semakin transparan dan akuntabel. Perkembangan teknologi informasi dapat menyebabkan proses pelayanan publik dilaksanakan melalui sistem elektronik (Rahma & Rani, 2023). Teknologi informasi saat ini juga menawarkan peluang penting dalam mengefisienkan penggunaan waktu pada saat melakukan aktivitas yang berkaitan dengan teknologi. Hal ini menuntut organisasi untuk terus berubah dan menggunakan teknologi untuk bersaing di masa kini (Lestari, 2021). Pemerintah memanfaatkan perkembangan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan mengubah proses pengelolaan keuangan daerah dengan bantuan teknologi. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintah yang transparan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah menurut pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 adalah kegiatan menyeluruh yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk melakukan proses penatausahaan dan mengelola keuangan daerahnya. Tanggung jawab ini dilaksanakan melalui integritas keuangan, pengungkapan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Pemerintah di Indonesia saat ini sedang berupaya untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah melalui penganggaran (Wahyuningsih, 2020). Anggaran daerah atau APBD menjadi hal penting karena merupakan rancangan dasar untuk menunjang pelayanan publik (Hoffman, 2022). Selain itu, anggaran daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan yang utama bagi

pemerintah daerah dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah (Mardiasmo, 2018). Namun, dalam penyelenggaraannya masih banyak menghadapi masalah salah satunya yakni keterlambatan dalam penetapan APBD (Hoffman, 2022).

Saat ini pemerintah menawarkan inovasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang akan memudahkan kegiatan operasional penyelenggara pemerintah dengan menyediakan website penyusunan anggaran secara elektronik atau *e-budgeting* (Arini & Nasehati, 2022). *E-Budgeting* merupakan sistem penganggaran berbasis elektronik dalam mengoperasikannya menggunakan website yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah (Rafiqi et al., 2020). Sistem ini dibuat secara online sehingga instansi dapat menggunakannya dimana saja serta dapat diakses kapan saja. Penerapan *E-Budgeting* dalam penyusunan anggaran akan menjadi lebih efektif dan efisien, karena semua data dan informasi yang diberikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah terinput dalam sistem digital (Rafiqi et al., 2020). Selain itu, penerapan sistem *E-Budgeting* tentunya dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Lestari, 2021).

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jember saat ini menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai pengganti aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). SIPD digunakan sejak tahun 2021, telah berjalan kurang lebih 2 tahun. SIPD merupakan sistem pengelolaan data daerah berbasis elektronik yang terintegrasi dengan pemerintah pusat. Salah satu OPD yang menggunakan SIPD yakni Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember yang digunakan untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerapan penganggaran secara elektronik dalam SIPD Kabupaten Jember bertujuan untuk mempermudah dalam pelaksanaan penganggaran, mencegah terjadinya penyelewengan keuangan daerah dan pemborosan anggaran. Namun penggunaan sistem informasi pemerintah daerah tersebut kurang optimal. Hal ini dikarenakan pegawai BPKAD mengalami kendala pada saat penyusunan anggaran pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kendala yang terjadi seperti pada saat proses input data anggaran

tidak tersimpan serta sering terjadinya error saat menggunakan sistem tersebut (Sumber: Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian (Kasubag) BPKAD Kabupaten Jember).

Melihat adanya kendala serta hambatan yang terjadi tentunya diperlukan suatu evaluasi program atau sistem untuk menilai efektivitas dari *e-budgeting*. Untuk mengetahui efektivitas *e-budgeting* maka perlu diadakan evaluasi terhadap program tersebut. Evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni model CIPP yang dikemukakan oleh Daniel L. Stufflebeam terdiri dari *Context, Input, Process* dan *Product*. Berdasarkan penelitian terdahulu membuktikan bahwa model CIPP dapat mengukur efektivitas dari program yang sedang berjalan (Rahman et al., 2019). Selain itu model CIPP merupakan model evaluasi yang dapat mengetahui pada bagian mana program tersebut yang bermasalah dan harus diperbaiki serta dikembangkan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi *e-budgeting* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember dengan judul “Implementasi *E-Budgeting* Dengan Model *Context Input Process Product* (CIPP) (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Jember)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini yakni bagaimana implementasi *e-budgeting* dengan model *Context Input Process Product* (CIPP) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan implementasi *e-budgeting* dengan model *Context Input Process Product* (CIPP) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari dilakukannya penelitian mengenai implementasi *e-Budgeting* sebagai berikut:

1. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan tentang sistem *e-budgeting* sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas sistem yang digunakan dalam proses penganggaran tersebut.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi masalah, memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan pada penelitian yang sejenis dan sebagai pelengkap untuk penelitian selanjutnya.